

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik (BPS) (2014) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Pengeluaran perkapita perbulan menunjukkan besarnya pengeluaran setiap anggota rumah tangga dalam kurun waktu satu bulan. Garis Kemiskinan merupakan besarnya nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non-makanan yang dijumlahkan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia relatif besar. Berdasarkan data dari (BPS) yang dikeluarkan pada bulan Maret 2016 menggambarkan bahwa penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen), bertambah sebesar 786 orang (0,17 persen) dibanding dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun 2013-2015 di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2013-2015

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase (%)
1	2013	275.779	28.553,93	11,47
2	2014	311.767	27.727,78	10,96
3	2015	344.706	28.513,57	11,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Berdasarkan Tabel 1, jumlah penduduk miskin dari tahun 2013 hingga 2015 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 tercatat bahwa kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa artinya jumlah penduduk kesejahteraannya semakin berkurang dalam standar kecukupan sandang, pangan dan papan. Dengan demikian perlu peningkatan kinerja dari pemerintah negara untuk lebih memperhatikan dan peduli terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Peningkatan kinerja tersebut dapat ditinjau dengan mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik kemiskinan baik itu di perkotaan maupun pedesaan.

Karakteristik kemiskinan di perkotaan dan pedesaan mempunyai ciri yang khas. Kemiskinan di pedesaan memiliki kecenderungan didominasi lahan pertanian sehingga penyebab kemiskinan paling utama bisa diprediksikan dari sektor tersebut. Kemiskinan di perkotaan merupakan imbas dari kemiskinan di pedesaan yang menyebabkan arus urbanisasi meningkat. Puncaknya, berbagai pemukiman kumuh (*slum*), kriminalitas, dan pengangguran menjadi semakin meningkat. Jumlah dan persentase penduduk miskin antar perkotaan dan pedesaan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin antar Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia Tahun 2015

No	Kategori	Perkotaan	Pedesaan	Kota+Desa
1	Jumlah Penduduk Miskin (000)	10.339,79	17.665,62	28.005,41
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,79	14,11	10,86

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Kemiskinan di perkotaan dan pedesaan juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi ini terbagi kedalam 7 wilayah Kabupaten atau Kota. Salah satu wilayah perkotaan yang memiliki penduduk miskin yaitu Kota Pangkalpinang. Dalam hal ini, BPS telah memberikan data berupa garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di tingkat Kabupaten atau Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat dilihat

pada Tabel 3.

Tabel 3. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Kategori		
		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentase (%)
1	Bangka	375.653	16,0	5,20
2	Belitung	563.475	12,7	7,36
3	Bangka Barat	388.493	6,1	3,15
4	Bangka Tengah	512.240	9,4	5,27
5	Bangka Selatan	364.504	7,4	3,87
6	Belitung Timur	492.652	7,9	6,68
7	Pangkalpinang	509.246	7,8	4,04

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Berdasarkan Tabel 3, angka garis kemiskinan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada diatas rata-rata garis kemiskinan Indonesia yakni sebesar Rp 311.767 per kapita per bulan pada tahun yang sama. Hal ini menjelaskan bahwa penentuan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat ditentukan dengan melihat tingkat pengeluaran yang lebih besar dibandingkan rata-rata di Indonesia. Artinya, tingkat pengeluaran diatas Rp 311.767 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum tentu dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Kota Pangkalpinang juga terdiri dari beberapa Kecamatan yakni diantaranya Kecamatan Rangkui, Bukit Intan, Girimaya, Pangkalbalam, Gabek, Taman Sari, dan Gerunggung. Jumlah penduduk miskin di setiap Kecamatan berbeda-beda dengan persentase rata-ratanya yaitu sebesar 14,70 persen. Jumlah dan persentase penduduk miskin per kecamatan di Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Per Kecamatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk		Persentase (%)
			Miskin		
1	Rangkui	37.719	6.470		17,15
2	Bukit Intan	35.960	5.537		15,40
3	Girimaya	19.881	2.942		14,80
4	Pangkalbalam	21.338	3.738		17,52
5	Gabek	24.719	3.010		12,18
6	Taman Sari	22.159	3.396		15,33
7	Gerunggang	34.426	4.926		14,31
Jumlah		196.202	30.019		15,30

Sumber : BPS dan Bappeda, 2016

Berdasarkan Tabel 4, persentase jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu di Kecamatan Pangkalbalam dimana masyarakatnya didominasi oleh masyarakat pesisir. Hal inilah yang merupakan akibat dari urbanisasi karena dominan masyarakat pesisir tersebut bukan masyarakat asli Kota Pangkalpinang melainkan berasal dari desa-desa di Bangka Belitung maupun di luar Bangka Belitung. Selain urbanisasi, jumlah penduduk dan luas suatu daerah juga sangat berpengaruh terhadap kemiskinan dimana semakin banyak jumlah penduduk dan semakin luas suatu daerah, maka semakin besar pula jumlah kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, diperlukan beberapa kebijakan pemerintah guna menurunkan angka kemiskinan khususnya di Kecamatan Pangkalbalam dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya menjadi lebih sejahtera.

Menurut Radli (2010), indikator kemiskinan yaitu antara lain konsumsi pakaian, konsumsi makanan, pendapatan, pendidikan, kemampuan berobat, dan kepemilikan aset ekonomi. Sedangkan menurut Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (2013), suatu rumah tangga dapat dikategorikan sangat miskin itu dilihat dari luas lantai bangunan, fasilitas buang air besar, penerangan listrik, sumber air minum, bahan bakar, konsumsi makanan dan pakaian, pengobatan, pendapatan, pendidikan, dan tabungan barang modal. Dengan kondisi rata-rata masyarakat di Kecamatan Pangkalbalam yang relatif sederhana atau dapat dikatakan menengah

kebawah, tentunya indikator kemiskinan perkotaan sangat sering dijumpai di daerah tersebut. Indikator kemiskinan sangat penting karena dapat berfungsi sebagai alat ukur dalam menentukan dan mengelompokkan masyarakat miskin. Hal ini tentunya dapat mempermudah dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin guna peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Menurut Irawan (2010), beberapa faktor penyebab kemiskinan yaitu laju pertumbuhan penduduk, angkatan kerja, timpangnya distribusi pendapatan, pemerataan pembangunan, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya perhatian dari pemerintah, dan kualitas sumber daya alam yang masih rendah. Faktor-faktor tersebut juga dapat menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Pangkalbalam. Telah diketahui bahwa Kecamatan Pangkalbalam merupakan daerah yang tingkat kemiskinannya tertinggi di Bangka Belitung. Maka dari itu, dengan adanya faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat sangat membantu dalam mengatasi sumber penyebab kemiskinan yang terjadi sehingga masyarakat pada daerah tersebut dapat ditingkatkan kesejahteraannya.

Berbagai macam program pemerintah sudah dilakukan saat ini untuk pengentasan kemiskinan seperti upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia. Namun upaya-upaya yang direncanakan akan berimplikasi positif jika mendapat dukungan dari berbagai pihak yang ada di Kota Pangkalpinang. Oleh karena itu penulis akan berupaya mengidentifikasi indikator, faktor-faktor penyebab kemiskinan serta hubungan kebijakan pemerintah daerah terhadap kemiskinan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana indikator kemiskinan masyarakat di Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor penyebab kemiskinan masyarakat di Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang?

3. Bagaimana hubungan kebijakan pemerintah daerah dengan kemiskinan di Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang?

C. Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan indikator kemiskinan masyarakat di Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat di Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.
3. Menganalisis hubungan kebijakan pemerintah daerah dengan kemiskinan di Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.

D. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Sebagai informasi dalam penetapan kebijakan bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan khususnya kemiskinan masyarakat di Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu media informasi, sarana pembelajaran dan bahan untuk penelitian selanjutnya.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang agar mampu mengatasi problematika kemiskinan yang dialami.